

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
DI KABUPATEN SEMARANG
(Studi kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat)**

Oleh : Rizky Adyatma Kusnaeni
NIM : 14020115130109

ABSTRAK

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program bantuan dari pemerintah dibidang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan akses pendidikan, meringankan biaya pendidikan, dan mencegah terjadinya anak putus sekolah. SDN Gogik 01 merupakan salah satu sekolah yang ada di Kec. Ungaran Barat yang masyarakatnya mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi dan mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan. Metode penelitian ini kualitatif. Pemilihan informan menggunakan teknik Purposive Sampling.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2019 dari siswa berjumlah 34 anak disebut pantas menerima sebab atas pertimbangan mata pencarian orang tua dan tempat tinggal yang belum layak, bahkan tempat tinggal murid tergolong jauh dari sekolah sehingga penyerahan KIP ini tergolong tepat sasaran. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan penelitian ini adalah: jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak, pengambilan keputusan, dan tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan. Saran yang diberikan yaitu: Perlunya sistematis yang mengalami perubahan di tiap periode disertai upaya menyosialisasikan supaya masing-masing pihak bisa menjalankan berdasarkan prosedur yang ditetapkan, penyelewengan dana KIP, dan kesulitan mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Indonesia Pintar (PIP)

ABSTRACT

The Smart Indonesia Program (PIP) is an assistance program from the government in the field of education to meet educational needs. The aim is to increase access to education, reduce the cost of education, and prevent children from dropping out of school. SDN Gogik 01 is one of the schools in the district. West Ungaran whose people receive the Smart Indonesia Program (PIP). The purpose of this study is to determine the implementation process and identify the critical success factors. This research method is qualitative. Selection of informants using purposive sampling technique.

The results of this study indicate that the implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) policy in 2019 from 34 students is considered appropriate said to be worthy of acceptance because of the consideration of parents' livelihoods and inadequate housing, even where students live is far from the school so that the delivery of KIP is right on target. Factors that influence the success of this research are: type of benefit, degree of desired change, location, decision making, and level of compliance of policy implementers. The suggestions given are: The need for systematic changes in each period accompanied by efforts to socialize so that each party can carry out according to established procedures, misappropriation of KIP funds, and difficulties in collecting receipts or evidence of the use of KIP funds.

Keywords: Implementation, Policy, Smart Indonesia Program (PIP).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)DI KABUPATEN SEMARANG (Studi kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara dengan kualitas pendidikan yang kalah dengan beberapa negara lainnya, bahkan kalah dengan negara ASEAN. Begitu pun mutu sumber daya manusia bangsa Indonesia yang berada di peringkat rendah. Disebabkan karena mutu dan akses pendidikan yang tidak berkualitas, dan kemiskinan. solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu:

Perluasaan pemerataan pendidikan, peningkatan anggaran dana pendidikan dan penurunan angka putus sekolah,serta penurunan tingkat kemiskinan.

Usaha pemerintah guna memberi peluang kepada masyarakat supaya mendapat pelayanan pendidikan, salah satunya yakni dengan Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini sebagai usaha pemerintah guna

melaksanakan pembangunan generasi yang lebih unggul dan memperoleh kelayakan pendidikan. Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan untuk sektor pendidikan yang diprioritaskan ke semua anak usia sekolah (6-21 tahun), atau keluarga yang situasi perekonomiannya berada digaris kemiskinan. PIP dilaksanakan atas rencana Kemendikbud dan Kemenag. PIP ialah bagian untuk menyempurnakan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) semenjak akhir 2014.

Realisasi penyaluran dana PIP di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penyaluran Dana PIP SDN Gogik 01

No	Tahun	Target		Disalurkan		Prosentase
		Siswa	Dana	Siswa	Dana	
1	2019	122	51.075.000	34	14.300.000	35,72%
2	2020	130	58.500.000	56	25.200.000	23,21%
3	2021	132	59.400.000	52	23.400.000	25,79%
4	2022	128	57.600.000	28	12.600.000	45,71%

Dari tabel di atas, penyaluran dana PIP SDN Gogik 01 ditemukan masalah.

Permasalahan itu, seperti pada tiap tahun bantuan PIP tidak sesuai dengan jumlah peserta didiknya.

Misalnya tahun 2019 yang sepatutnya memperoleh bantuan 122 siswa, tercatat hanya 34 peserta didik yang memperoleh bantuan. Jumlah dan yang harusnya diterima sebesar Rp 51.075.000,00 dan siswa penerima dana PIP di sekolah baru Rp 14.300.000,00 padahal permintaan pemohon untuk dana PIP sangat tinggi. Hal ini selalu terulang pada tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang, penulis bermaksud melaksanakan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang (Studi Kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat).**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi menjadi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang (Studi kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat)?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang

(Studi kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang (Studi kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat).
2. Mengidentifikasi faktor yang menjadi penentu keberhasilan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang (Studi kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat).

D. Teori

1. Administrasi Publik

Menurut Chandler dan Plano, menuturkan bila administrasi publik sebagai tahapan ketika sumber daya dan anggota publik terorganisasi dan terkoordinasi demi merancang, menerapkan, dan manajemen keputusan pada kebijakan publik.

2. Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson (dalam Subarsono. 2005: 2) mendefinisikan kebijakan publik ialah wewenang atas penentuan

badan maupun aparat pemerintahan. Pendapat tersebut lebih menekankan pada peran aktor dari dalam pemerintah (pejabat dan badan pemerintah) di sektor tertentu, semisal bidang pendidikan, perekonomian, pertanian, industri dan lain-lain.

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Charles O. Jones (I nyoman, 2005: 15) menuturkan jika tahap kebijakan publik seperti anggapan, agreraris, penggambaran, organisasi, menyusun agenda, legitimasi, menganggarkan, perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan menyesuaikan. Kegiatan birokrasi pemerintahan ditekankan ke proses yang lebih dari tahap penerapan dengan menjabarkan kebijakan sebagai program, proyek, maupun aktivitas. Atas dasar itulah, program ialah unsur pertama yang perlu tersedia agar bisa mencapai aktivitas pelaksanaan.

4. a. Definisi Program

Menurut Korten (dalam Jones 1996: 232) menuturkan bila program ialah sekumpulan proyek yang terkait sudah terancang guna menjalankan aktivitas yang

terintegrasi dan berkesinambungan demi memperoleh target kebijakan secara menyeluruh.

b. Konsep Implementasi Program

Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) menuturkan bila terdapat tiga kegiatan utama untuk menjalankan program, seperti:

- a) Mengorganisasi
- b) Menginterpretasikan.
- c) Aplikasi.

5. Model Implementasi

Model penerapan kebijakan sesuai penjelasan Merilee S. Grindle. Model ini disebut sebagai *Implementation as A Polical and Administrative Process*. Kesuksesan suatu penerapan kebijakan publik, sesuai penuturan Grindle, cenderung ditetapkan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan tersebut, meliputi:

A. Content of Policy

- a. Tipe Manfaat:
- b. Tingkat perubahan yang hendak diperoleh
- c. Letak Penentuan Keputusan
- d. Pelaksana Program
- e. Sumber daya yang dipergunakan

B. Context of Policy

- a. Kekuasaan, kepentingan, maupun strategi dari aktor yang terlibat.
- b. Kriteria lembaga dan rezim yang berkuasa.
- c. Tingkat ketaatan maupun kehadiran reaksi dari pelaksana.

E. Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang gejala tertentu. Sumber data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada informan mengenai implementasi PIP pada studi kasus pelaksanaannya di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat dan pengamatan langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni observasi langsung di SDN Gogik 01 dengan wawancara kepada pihak terkait yakni pengelola PIP dan masyarakat penerima dana PIP.

F. Hasil Penelitian

Penelitian Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang (Studi kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat) mendapatkan hasil:

a. Pengorganisasian

Tanggung jawab koordinator KIP di sekolah termuat di surat keputusan kepala sekolah. KIP yang disosialisasikan pun terlaksana pada tahun ajaran baru ke peserta didik maupun wali murid. Lalu, peserta didik yang telah ditentukan selaku penerima akan koordinator kumpulkan untuk diberi tahu perihal manfaat dana tersebut.

Peserta didik yang menerima bantuan KIP di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat pada tahun 2019 berjumlah 34 murid yang semuanya mempunyai KIP. penerima bantuan KIP di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat bisa disebut pantas menerima sebab atas pertimbangan mata pencarian orang tua dan tempat tinggal yang belum layak. Bahkan, tempat tinggal murid tergolong jauh dari sekolah

sehingga penyerahan bantuan PIP ini tergolong tepat sasaran.

Pihak sekolah tidak terlibat dalam penentuan keputusan perihal penetapan target penerima KIP. Sekolah sekadar memberi usulan unsur peserta didik dari keluarga dengan situasi perekonomian berada di garis kemiskinan, serta tanpa mempunyai KIP, KKS, KPS/PKH. Peserta didik yang mendapat hak memperoleh KIP akan ditangani oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Prosedur penerimaan dana itu mempergunakan Basis Data Terpadu dan Data Pokok Pendidikan(DAPODIK) yang memuat data diri peserta didik, yaitu kondisi keluarga peserta didik. Sesudah mempertimbangkan dan menentukan target, KIP akan dikirimkan ke alamat orang tua peserta didik melalui kantor pos. Dengan demikian, murid yang tidak mampu melanjutkan pendidikan atau putus sekolah akibat terkendala oleh biaya, maka melalui KIP ini mereka bisa memperoleh pendidikan yang layak.

b. Interpretasi

Mekanisme Pendataan dan Verifikasi Data Program Indonesia Pintar (PIP)

Rekapitulasi maupun verifikasi data peserta didik yang menerima KIP tidak bisa peneliti telusuri sebab dokumen asli sudah dikirimkan dan pihak sekolah tidak mempunyai arsip dokumen itu. Berikutnya, Dinas Pendidikan Kabupaten memperoleh data usulan agar bisa diserahkan langsung ke Kemendikbud. Pada tahapan ini, sekolah bisa disebut berhenti dari tahap KIP yang berlangsung hingga surat keputusan peserta didik penerima KIP telah diperoleh sekolah, serta akan diproses berikutnya: mengundang penerima KIP agar mendapat informasi terkait dana bantuan.

c. Aplikasi

Mekanisme dalam Menyalurkan Dana PIP di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat.

Penerapan kebijakan PIP di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat diarahkan ke peserta didik dengan kondisi keluarga yang serba

kekurangan secara ekonomi sehingga sulit memenuhi segala keperluan pendidikan anaknya. Alokasi dana KIP di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat diberikan agar bisa mendanai pendidikan anak dengan orang tua yang kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan pendidikan anaknya supaya bisa bersekolah secara layak. Dana yang didapat bisa dimanfaatkan untuk mencukupi segala kebutuhan sekolah, seperti pembelian seragam dan segala kebutuhan lain terkait pendidikan. Nominal dana yang didapat sejumlah Rp 450.000,00 yang diserahkan secara langsung selama satu tahun.

2. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Program Indonesia Pintar di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat .

1. (*Content of Policy*)

a. Tipe Manfaat

Penerapan PIP di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat harus mempunyai manfaat yang jelas guna membantu keluarga peserta didik yang termasuk kurang mampu guna

mencukupi segala kebutuhan, termasuk terkait pendidikan anaknya. Program ini setidaknya bisa menciptakan angka keterlibatan masyarakat di bidang pendidikan, serta meminimalkan potensi angka putus sekolah .

b. Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai

Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat, perubahan yang akan diperoleh kebijakan tersebut ialah agar meningkatkan prestasi siswa yang ada di SDN Gogik 01 yang berdampak kepada meringankan beban orang tua dan peserta didik makin aktif sebab alat sekolah bisa tercukupi.

c. Letak Pengambilan Keputusan

Tim implementasi PIP bukan sebagai pihak yang mengambil keputusan. Tim implementasi PIP jarang memutuskan keputusan yang bersifat penting karena kebijakan tersebut selama sudah berjalan dengan cukup baik. Adapun apabila membutuhkan suatu pengambilan keputusan yang penting, akan

dilakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SDN Gogik 01 sebagai kepala sekolah yang diberikan wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan program Indonesia Pintar (PIP) tersebut.

d. Pelaksana Program

Koordinator PIP Sekolah SDN Gogik 01 sebagai pelaksana program sudah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik sebagai pelaksana kebijakan PIP itu. Perihal tersebut bisa diperhatikan dari tidak

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bermaksud guna mencari tahu penerapan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang, tepatnya di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan tersebut. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti akan menyimpulkan, seperti:

1. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Semarang

adanya permasalahan pada penerapan program PIP selama ini perihal pengelolaan penerapan kebijakan oleh Koordinator PIP SDN Gogik 01.

2. (*Context of Policy*)

a. Taraf Ketaatan dan Kehadiran Respons dari Pelaksana

SDN Gogik 01, pelaksana PIP bisa teramati dari kepuasan peserta didik maupun orang tuanya. Sekolah sudah baik dalam implementasi kebijakan PIP.

studi kasus di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat.

A. Pengorganisasian terdiri dari:

Koordinator penerapan PIP SDN Gogik 01 dengan cara membentuk kepanitiaan dengan langkah dini pada sistematisa dalam melaksanakan PIP, yaitu menyosialisasikan ke peserta didik yang memiliki KIP dapat mengumpulkannya di sekolah agar bisa diusulkan mendapat bantuan. Peserta didik penerima bantuan KIP di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat pada tahun 2019 berjumlah 34 siswa yang seluruhnya memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penerima

bantuan PIP SDN Gogik 01, pencairan dana Program Indonesia Pintar(PIP) dilaksanakan dengan mencantumkan dokumen Surat Keterangan Kepala Sekolah, salinan rapor berisikan data diri, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) siswa (bila ada).

B. Interpretasi terdiri dari:

Mekanisme pendataan dan verifikasi data PIP di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat. Mekanisme awal pengusulan PIP untuk siswa yang mempunyai KIP cukup melaporkan ke sekolah menyertakan dua salinan KIP itu. Langkah selanjutnya ialah merekapitulasi dan memverifikasi KIP yang peserta didik bawa, lalu menyesuaikannya dengan kondisi penerima berdasar ketentuan yang direncanakan. Mekanisme selanjutnya adalah mengirim data, kemudian Dana PIP bagi siswa di SDN 01 Gogik dikirimkan melalui BRI.

C. Aplikasi terdiri dari:

Sistematika menyalurkan dana PIP di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat diberikan ke peserta didik dari keluarga menengah ke bawah dengan

kondisi perekonomian tidak dapat mencukupi kebutuhan, termasuk kebutuhan pendidikan anak. Pemanfaatan dana KIP bisa untuk membeli buku maupun alat atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan.

B.Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Penerapan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Gogik 01 Kec. Ungaran Barat .

a. Tipe Manfaat

Implementasi mengenai kebijakan PIP di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat cukup memberikan manfaat untuk sekolah, guru, orang tua siswa ataupun siswa. Perihal itu karena melalui kehadiran rencana ini, diharapkan mampu mengurangi beban biaya pendidikan, orang tua akan mengetahui terkait kebermanfaatan dari bantuan PIP.

b. Derajat perubahan yang diinginkan

Penerapan PIP di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat, perubahan yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut adalah untuk adalah agar meningkatkan prestasi siswa yang ada

di SDN Gogik 01 yang berdampak ke meringankan beban orang tua dan peserta didik akan terlibat aktif sebab alat-alat sekolah bisa dipenuhi.

c. Letak pengambilan keputusan

Penerapan PIP di SDN Gogik 01 Kecamatan Ungaran Barat, dilaksanakan oleh Koordinator PIP SDN Gogik 01 dan apabila dibutuhkan pengambilan keputusan yang bersifat penting, maka dilakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah SDN Gogik 01 sebagai instansi yang diberikan wewenang untuk mengimplementasikan kebijakan PIP. Tingkat pelaksana program ditemukan bila kompetensi dan kapabilitas sekolah sangat baik sehingga tidak ditemukan permasalahan dalam penerapan kebijakan PIP, dan pelaksana pun memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi serta respon yang baik dalam implementasi kebijakan.

B. Saran

Sesuai hasil kajian terkait penerapan kebijakan PIP di Kabupaten Semarang (Studi kasus di SDN Gogik

01 Kecamatan Ungaran Barat), peneliti memberi saran:

1. Bagi pemerintah

a. Sistematis yang mengalami perubahan di tiap periode disertai upaya menyosialisasikan supaya masing-masing pihak bisa menjalankan berdasarkan prosedur.

b. Tidak hanya itu, pemerintah sepatutnya melakukan pembentukan tim pengawas PIP sebab sesuai hasil wawancara antara peneliti dengan partisipan, memperjelas jika pihak sekolah atau dinas tidak menyediakan pengawasan. Lalu, sepatutnya pemerintah memberi wewenang luas bagi sekolah supaya terlibat dalam penentuan keputusan terkait kebijakan PIP.

c. Untuk Pemerintah daerah Kab. Semarang/DISDIKUDPORA perlu membuat regulasi PIP sebagai payung hukum turunan dari program Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, sebab di kabupaten dan kota madya lain di Indonesia juga membuat, seperti di Kota Semarang, Kab. Demak, Kota Payakumbuh di Sumatera Barat dll.

2. Bagi sekolah

a. Terkait isi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, diharapkan sekolah bisa membina peserta didik yang menerima KIP supaya bisa berkompetisi agar situasi itu pun membantu mengoptimalkan kualitas pendidikan peserta didik itu.

b. Sekolah pun bisa memberi dana KIP bukan sekadar ke peserta didik yang meneriman, tetapi turut mengundang wali murid peserta didik lain supaya bisa melihat bila anak mereka memperoleh dana KIP. Kendati sekolah telah memercayai para peserta didiknya, tetapi akan lebih baik bila wali murid diundang pula.

c. Diharapkan sekolah melakukan pengelolaan data, pengarsipkan dokumen sekolah, serta acap mempersiapkan data cadangan. Nantinya, bila ada pihak pelaksana kebijakan yang menanyakan, maka sekolah bisa bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo (2006). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV ALFABETA.

Abdul Wahab, Sholicin (2008). Pengantar Kebijakan Publik, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.

H.A.R Tilaar & Riant Nugroho (2008). Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasbullah, H. (2015). Kebijakan Pendidikan: dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kusumanegara, Solahuddin (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.

Kencana, Inu. (2006). Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT.Renika Cipta

Moleong, L. J. (2010). Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Pasolong, Harbani. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung: CV ALFABETA.

Riant Nugroho (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT.Elek Media Komputindo.

Rohman, Arif (2012). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Subarsono, AG (2013). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: CV ALFABETA.

Suwitri, Sri (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

T. Keban, Yeremias (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Wahab, S.A (2008). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara, edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal/Skripsi

Ega Aditya Alfa Riqi(2020). Implementasi Program Indonesia Pintar Sekolah Dasar Di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Jurnal:UNDIP

N. Eni Rohaeni& Oyon Saryono. Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya

Pemerataan Pendidikan. Indonesian Journal of Education Management and Administration Review 2018 June, Volume 2 Number 1

Rini Septiani Astuti (2016). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar dalam Pemerataan Pendidikan Tahun Ajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Semin Yogyakarta. Jurnal: Yogyakarta: UNY.

Riska Anugrah(2018). Implementasi Program Indonesia Pintar Di Kota Bandar Lampung(Studi kasus di SDN 1 Pelita Tanjung Karang Pusat Kec.Enggal). Jurnal: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Yudi Agusman(2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. Public Inspiration: Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik.

Regulasi:

Permendikbud Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015.

Permendikbud Republik Indonesia No. 25 Tahun 2015.

Republik Indonesia (2003). UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretaris Kabinet RI

Republik Indonesia (2014). Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga

Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. Jakarta: Sekretaris Kabinet RI.

Internet:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). Data Pokok PSMK 2013 terakses melalui:<http://datapokok.ditpsmk.net/detil.php?id=0402060001>. Diakses Tanggal 17 Mei 2019. Pukul 13.00 WIB.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP). Jakarta:KEMENDIKBUD. Diakses Tanggal 17 Mei 2019. Pukul 11.00 WIB.

<http://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2020/08/Fenomena-Kebijakan-Publik-dalam-Perspektif-Administrasi-Publik-diIndonesia.pdf>. Diakses tanggal 7 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.